

PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI MASYARAKAT KELOMPOK USAHA PARIWISATA BAHARI KEPULAUAN TIDUNG

Dihin Septyanto¹, I'in Endang Mardiani², Lia Amalia³, Yosevin Karnawati⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk 11510 Jakarta Barat
dihin.septyanto@esaunggul.ac.id

Abstrak

Tujuan utama pengabdian masyarakat adalah melakukan pengelolaan penentuan tarip pelayanan pariwisata bahari sebagai penentuan harga jual pariwisata Pulau Tidung agar dapat terjangkau oleh konsumen dan wisatawan domestik dan mancanegara, membentuk penataan pengelolaan keuangan dalam bisnis wisata bahari berdasarkan pendekatan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, serta pengembangan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Tidung yang mandiri. Metode pengabdian masyarakat menggunakan Rapid Rural Appraisal dengan rencana tindak pemberdayaan usaha pariwisata melalui pelatihan kegiatan usaha wisata bahari dalam penentuan tarip jasa wisata bahari, pembinaan dalam pengelolaan keuangan bisnis wisata bahari, serta pendampingan dalam penyusunan sistem akuntansi jasa wisata bahari baik secara manual maupun komputerisasi. Hasil kegiatan pelatihan perencanaan dan pengelolaan keuangan serta modal kerja UKM untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan berjalan dengan lancar karena peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat pelatihan bagi kemajuan usaha mereka.

Kata kunci: wisata bahari, pengelolaan keuangan, modal kerja

Pendahuluan Analisis Situasi

Indonesia terkenal sebagai Negara archipelago dengan banyak pulau dan suku bangsa, adapun serta kebudayaan menjadikan keunggulan daya tarik untuk menjadi tempat singgah sebagai salah satu negeri yang indah dan menjadi salah satu faktor penunjang dalam pariwisata Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu kegiatan industri pelayanan jasa sebagai andalan Bangsa Indonesia untuk peningkatan devisa Negara. Salah satunya adalah Pulau Tidung yang berada pada Kecamatan kepulauan Seribu Selatan.

Pulau Tidung dapat di jadikan alternatif wisata bahari di kepulauan seribu. Nuansa laut berwarna biru kehijauan dan biru gelap pertanda laut dalam. Pantai ini tidak berombak besar karena gugusan karang dan terumbu karang yang mengelilingi mampu menahan ombak, cukup aman untuk berenang. Ekosistem terumbu karang pulau ini masih mempunyai keindahan yang cukup baik, khususnya apabila melakukan kegiatan snorkeling/diving. Bersepeda ria, memancing dan wisata keliling pulau sekitarnya. Laut Kepulauan Seribu masih

bening sehingga terumbu karang terlihat jelas dari permukaan.

Pulau Tidung merupakan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pulau Tidung di perkirakan lebarnya hanya sebesar 200 M dan panjangnya hanya sekitar 5 KM, dan terbagi dua yaitu Tidung Besar dan Tidung Kecil. Pulau Tidung dapat dijadikan pariwisata Bahari sehingga sektor pariwisata mendukung pembukaan lapangan usaha, yang juga menjadi penggerak pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kep. Seribu, seperti dari perdagangan, restoran, souvenir dan hotel. Obyek wisata bahari Pulau Tidung sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata unggulan dan daya tarik wisata ke Kepulauan Seribu Selatan. Begitu banyaknya obyek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu apabila dikembangkan secara profesional akan sangat mungkin jira Pulau tidung menjadi primadona kunjungan wisatawan baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional dengan melihat pada potensi yang ada. Didukung oleh letak geografis Kabupaten Kepulauan Seribu yang strategis dan kondisi

alam yang sangat indah sangat memungkinkan pariwisata untuk berkembang pesat.

Perekonomian Pulau Tidung semakin meningkat dengan peningkatan wisatawan yang menikmati eksotisme pulau tersebut. Wisatawan yang berkunjung makin lama makin banyak seiring dengan terekosnya Pulau Seribu dalam musim-musim tertentu, seperti liburan dan week-end. Kunjungan wisatawan ke Kepulauan Seribu selama liburan diperkirakan mengalami peningkatan dengan rata-rata sekitar 3.000 hingga 5.000 per minggu. Namun, jumlah pengunjung bisa mencapai 15 ribu hingga 20 ribu wisatawan dalam seminggu di saat musim liburan. Potensi ini tidak diimbangi dengan fasilitas yang cukup untuk mengakomodasi jumlah wisatawan yang semakin meningkat, seperti kecukupan tersedianya fasilitas losmen atau penginapan atau hotel yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Proses ini memberikan implikasi kepada harga pariwisata yang ditawarkan bersaing tidak wajar sehingga harga paket pariwisata bahari bersifat trial error sehingga penentuan tarif jasa pariwisata tidak tepat. Implikasinya pelayanan pariwisata dalam hal harga pariwisata harus dikelola untuk disesuaikan menurut tarif jasa yang tepat. Karena salah satu indikator pelayanan yang memadai adalah memberikan harga pelayanan pariwisata dengan tarif yang memadai yang wajar.

Dalam memutuskan besarnya tarif yang diberikan atau untuk menyusun besarnya harga pelayanan pariwisata maka perhitungan unit cost (biaya satuan) akan sangat membantu. Penentuan unit cost dalam analisis biaya diperlukan untuk mengetahui besarnya biaya yang benar-benar dibutuhkan untuk menghasilkan suatu jasa, disamping tujuan lainnya seperti menilai efisiensi dalam anggaran (Supriyanto, 2000). Biaya satuan (unit cost) sangat penting artinya karena merupakan salah satu dasar dalam menentukan tarif pelayanan disamping faktor kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat. Biaya satuan memiliki tujuan (Gani Ascobat, dkk, 2002) untuk menetapkan harga pokok standar, Sebagai dasar penetapan harga jual produk atau jasa, untuk menentukan kebijakan cara penjualan produk atau jasa bila diperlukan perluasan. Kebijakan ini diperlukan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat.

Permasalahan Mitra

Wisata Pulau Tidung melibatkan semua pihak mulai dari aparat desa, karang taruna, hingga masyarakat untuk membangun sebuah wisata rakyat yang menguntungkan bagi semua pihak. Seperti studi kasus di wisata bahari Pulau Tidung masyarakat lokal telah diberi kepercayaan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Seribu Selatan untuk melakukan usaha wisata bahari sehingga masyarakat lokal telah banyak terlibat dalam usaha-usaha pengelolaan. Tetapi selama ini usaha dan pengelolaan wisata bahari masih sederhana, sehingga pengelolaan yang melibatkan masyarakat tersebut terlihat belum kentara hasilnya. Hal ini terjadi karena pemberdayaan masyarakat lokal kurang terbina dengan baik, walaupun telah ada beberapa bantuan pembangunan sarana dan prasarana dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu yang mencoba melakukan penguatan lembaga pengelola dan pembangunan masyarakat (community development) dalam pengelolaan obyek wisata alam.

Selama ini, kegiatan pariwisata di Pulau Tidung masih dikelola secara tradisional dan parsial. Villa-villa dan tempat penginapan hanya terisi pada akhir pekan saja, sedangkan pada hari-hari biasa, Pulau Tidung seperti Pulau mati, yang hanya di huni oleh segelintir penduduk. Pengelolaan Pulau tidung yang tradisional dan parsial menyebabkan standardisasi pariwisata tidak terjaga, sehingga sangat sulit untuk mengemas Pulau Tidung menjadi brand pulau wisata yang dapat dijual.

Harga berwisata di Pulau Tidung tergolong murah apabila wisatawan datang dalam rombongan. Seperti sewa sepeda maupun peralatan menyelam menerapkan harga yang sama walaupun dari pihak penyewa yang berbeda-beda. Sementara harga penginapan sangat fleksibel. Tarif satu kamar Rp. 300.000 bisa untuk lima orang dan akan berbeda harganya bila untuk individu. Pulau tidung sebagai obyek wisata bahari harus dapat memberikan pelayanan pariwisata yang berkualitas. Untuk menjaga kesinambungan pelayanan pariwisata yang berkualitas, pengelola pariwisata harus dapat menentukan besaran tarif yang dapat menjamin total pendapatan lebih besar daripada total pengeluaran. Apabila tarif terlalu rendah, dapat

menyebabkan total pendapatan rendah pula, dan apabila lebih rendah dari total pengeluaran, pasti akan menimbulkan kesulitan keuangan. Secara umum, salah satu faktor penentu besaran tarif pelayanan pariwisata adalah kemampuan dan kemauan masyarakat dalam membayar pelayanan pariwisata bahari serta adanya tarif pesaing. Sebagai penyedia jasa pelayanan pariwisata bahari, pengelola pariwisata Pulau Tidung sebaiknya tidak mengesampingkan respon masyarakat dan tarif pesaing dalam menentukan besaran tarif.

Berdasarkan hal tersebut diatas, permasalahan yang terdapat pada pengelolaan obyek wisata bahari Pulau Tidung oleh pengelola pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya studi ekonomi mengenai penentuan tarip jasa pariwisata yang menjadi dasar harga pariwisata Pulau Tidung. Penentuan Tarip jasa pariwisata dilakukan secara trial-error.
2. Belum menerapkan pengelolaan keuangan dalam bisnis jasa pariwisata berdasarkan pendekatan sistem akuntansi
3. Belum menerapkan sistem perpajakan yang baik untuk self assesment.

Tujuan Program

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat di Pulau Tidung adalah:

1. Melakukan pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan bisnis wisata bahari.
2. Melakukan pendampingan dalam penyusunan modal kerja yang likuid dalam bisnis wisata bahari.
3. Melakukan pendampingan dan pembinaan dalam proses penyusunan laporan perencanaan keuangan dan modal kerja wisata bahari.
4. Pengembangan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Tidung yang mandiri.

Metode Pelaksanaan

Untuk mendukung tujuan, Tim dari Universitas Esa Unggul akan melakukan pelatihan, pendampingan dan pembinaan berkaitan dengan penentuan tarip jasa pariwisata, akuntansi, serta perpajakan, yaitu:

1. Pendekatan quality awareness

Kualitas pelayanan merupakan faktor yang penting untuk dapat mendatangkan wisatawan dan mempertahankan wisatawan untuk kembali menikmati pariwisata Pulau Tidung. Tujuan aktivitas tersebut adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kualitas pelayanan pariwisata yang akan diterima oleh para wisatawan.

Kualitas pelayanan terkait dengan harga pelayanan pariwisata. Penentuan besarnya tarif untuk menyusun besarnya harga pelayanan pariwisata maka perhitungan unit cost diperlukan. Pentingnya adalah mengetahui besarnya biaya yang benar-benar dibutuhkan untuk menghasilkan suatu jasa pariwisata (Supriyanto, 2000) serta disamping faktor kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat. Implikasi harga pelayanan adalah dasar penetapan harga jual jasa pariwisata serta menentukan kebijakan cara penjualan produk bila diperlukan perluasan. Kebijakan ini diperlukan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Bentuk dari quality awareness adalah sosialisasi pelayanan pariwisata dan workshop, serta melibatkan aparat pemerintahan setempat untuk mengorganisasi semua penduduk yang memiliki fasilitas-fasilitas komersial.

2. Metoda Rapid Rural Appraisal (RRA) untuk menyusun tindakan Pendampingan, Pelatihan, dan Pembinaan

Metoda penyusunan data dan rencana pengembangan Rapid Rural Appraisal (RRA). Rapid Rural Appraisal (RRA) merupakan suatu kegiatan sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh peneliti atau tenaga ahli dari berbagai disiplin dengan tujuan mengumpulkan informasi dan data secara cepat dan efisien tentang fenomena kehidupan dan sumberdaya masyarakat di pedesaan. RRA memfokuskan pada upaya dan peran yang lebih besar kepada tim peneliti (expert) untuk melakukan pengkajian secara mendalam. Masyarakat cenderung ditempatkan sebagai objek kajian yang akan menjadi bahan bagi tim untuk menyusun asumsi, deskripsi dan kerangka tindakan.

Metoda RRA digunakan untuk menyusun rencana tindak kesiapan masyarakat Pulau Tidung dalam menyongsong dan mengembangkan pantai Siung sebagai kawasan tujuan wisata, terutama rencana tindak yang berkaitan dengan bagaimana kelompok usaha pariwisata mengatasi masalah penentuan tarif jasa pariwisata, pengelolaan keuangan dan akuntansi, serta aspek perpajakan. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan dan pendampingan kegiatan pelayanan pariwisata berbagai jenis yang ada di Pulau Tidung sejak menerima wisatawan, melayani wisatawan, sampai wisatawan meninggalkan Pulau Tidung.

RRA akan dihasilkan rencana tindak pemberdayaan usaha pariwisata yang dilanjutkan dalam pendampingan sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan bisnis wisata bahari.
2. Melakukan pendampingan dalam penyusunan modal kerja yang likuid dalam bisnis wisata bahari.
3. Melakukan pendampingan dan pembinaan dalam proses penyusunan laporan perencanaan keuangan dan modal kerja wisata bahari.

Usulan program pelatihan, pembinaan dan pendampingan proses pengelolaan usaha wisata bahari Pulau Tidung berbasis masyarakat akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan usaha wisata bahari. Adapun hasil dari proses tersebut adalah terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pelatihan dibagi dalam 3 tahap selama 2 hari. Pada hari pertama diawali dengan registrasi dan pembukaan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pemberian materi pertama dengan topik materi Pengantar Pengelolaan Keuangan dan Modal Kerja bagi UKM.

Materi ini membahas pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan bagi UKM. Materi pertama kedua ini juga disampaikan dengan topik transaksi-transaksi modal kerja dan pelaporan modal kerja UKM.

Pelatihan hari kedua materi disampaikan oleh pemateri dengan topik praktik pengelolaan keuangan UKM. Kemudian, pada hari terakhir pelatihan ini peserta diminta mencatat transaksi bisnis keuangan dan modal kerja berdasarkan bisnis masing-masing dan selanjutnya menyusun pelaporan modal kerja. Pada sesi terakhir ini kegiatan pelatihan diakhiri pada jam 15.00. Selanjutnya sisa pelatihan 7,5 jam digunakan untuk pendampingan kepada peserta pelatihan pengelolaan keuangan UMKM secara mandiri di masing-masing tempat.

Pembahasan

Pelaksanaan pelatihan pada hari pertama berjalan dengan lancar. Materi pertama yang diberikan adalah pengenalan atau pendahuluan mengenai keuangan UMKM. Pemateri memberikan penjelasan pentingnya perencanaan keuangan dan pengelolaannya serta modal kerja yang likuid bagi UMKM. Sebagian besar audiens belum mengerti fungsi keuangan dan modal kerja, bahkan sebagian besar peserta pelatihan menganggap bahwa perencanaan keuangan dan pengelolaannya adalah bidang yang rumit, susah, merepotkan, menghabiskan waktu.

Materi pertama ini diisi dengan penguatan pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan bagi usaha kecil (UMKM). Pada sesi ini terjadi diskusi yang menarik antara audiens dengan pemateri mengenai konsep dasar keuangan untuk usaha. Beberapa audiens memiliki persepsi berbeda tentang usaha atau entitas. Berdasarkan diskusi konsep entitas ini akhirnya diperoleh pemahaman konsep entitas. Setelah diperoleh kesepakatan tentang konsep entitas, dilanjutkan dengan fungsi perencanaan dan pengelolaan serta pelaporan keuangan bagi entitas. Setelah acara ISHOMA selama satu jam acara dilanjutkan dengan materi kedua mengenai transaksi-transaksi dalam modal kerja untuk likuiditas usaha. Pada sesi ini, masing-masing audiens diminta menjelaskan aktivitas operasi masing-masing usaha mereka. Selanjutnya diidentifikasi aktivitas-aktivitas ekonomi dan aktivitas nonekonomi. Berdasarkan aktivitas ekonomi yang telah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan pencatatan akuntansi dan modal kerja yang

penting bagi kontinuitas usaha. Aktivitas yang diidentifikasi tersebut diawali dari aktivitas memulai usaha (investasi awal), transaksi pembelian bahan baku, pembelanjaan, pemasukan, dll.

Setelah mencatat transaksi modal kerja dan pengelolaannya, materi berikutnya menyusun laporan perencanaan dan modal kerja. Sebagai latihan, peserta pelatihan diminta membuat laporan keuangan sederhana berdasarkan contoh yang ada. Latihan ini berakhir pada pukul 15.00 sore. Sebelum peserta pelatihan pulang, pemateri memberikan tugas berupa identifikasi transaksi yang terjadi di masing-masing usaha mereka.

Pelatihan hari kedua materi praktik akuntansi UMKM yang dilanjutkan kembali dari materi sebelumnya. Pada akhir pelatihan, peserta diminta mengumpulkan mencatat transaksi bisnis berdasarkan bisnis masing-masing yang telah disiapkan dari rumah. Pada sesi awal ini peserta bertanya dan berdiskusi tentang transaksi dan pencatatan yang telah mereka buat. Beberapa dari peserta masih kebingungan mencatat dan membuat perencanaan serta pengelolaannya. Sesi pertama ini cukup menyita waktu karena pembahasan transaksi dan pencatatan akuntansi dilakukan satu satu. Setelah semua peserta menyelesaikan pembuatan perencanaan dan pelaporan keuangan, peserta beristirahat untuk makan siang dan melakukan ibadah siang. Setelah beristirahat diskusi dilanjutkan membahas penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan. Pada sesi terakhir ini peserta diminta menyusun perencanaan keuangan dan bagaimana melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan transaksi dan rencana yang telah mereka buat. Pada sesi terakhir ini kegiatan pelatihan diakhiri pada jam 15.00. Selanjutnya sisa pelatihan 7,5 jam digunakan untuk pendampingan kepada peserta pelatihan perencanaan dan pengelolaan keuangan UMKM secara mandiri di masing-masing tempat.

Faktor Pendukung Kegiatan

Secara umum acara pelatihan ini berjalan dengan lancar. Hal ini dicapai berkat dukungan Pemerintah Kepulauan Tidung yaitu fasilitas tempat serta bantuan dalam mengumpulkan audiens peserta. PemKab

Kepulauan Tidung menyambut baik acara pelatihan ini sehingga berkeinginan agar pelatihan ini tetap berlanjut di masa yang akan datang untuk kemajuan anggotanya.

Faktor Penghambat Kegiatan

Acara PPM dapat terlaksana dengan lancar karena pembagian tugas telah dilakukan jauh hari sebelum acara ini dilaksanakan. Hambatan lain yang dijumpai tim PPM adalah keikutsertaan atau kehadiran peserta yang tidak seratus persen hadir, yaitu hanya 47 peserta yang hadir dari 54 undangan. Hal ini diduga karena beberapa peserta yang diundang memiliki kegiatan di tempat lain, seperti mengikuti pameran di luar kota, pelatihan yang diselenggarakan instansi lain.

Kesimpulan

Kegiatan pelatihan perencanaan dan pengelolaan keuangan serta modal kerja UMKM bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat pelatihan bagi kemajuan usaha mereka.

Saran

Pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (audience) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya. Di samping itu fasilitas untuk presentasi seperti LCD dan pengeras suara sebaiknya diperiksa kembali sebelum acara dilaksanakan.

Daftar Pustaka

Gani, Ascobat,dkk. 2002. Perencanaan dan penganggaran Kesehatan Terpadu (Integrated Health Planning and Budgeting), Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta.

Supriyanto, S., J.P. Widiada, N.Anita D,Thinni NR.Djasiki. 2000. Analisis Biaya satuan dan Penyesuaian Tarif Pelayanan Puskesmas, Bagian Administrasi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya.